

# KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 27 February 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia Halaman 21	Kamis, 27 February 2020	Menteri Hadir, Ke Mana 3 Gubernur?	<p>“Mau lihat SMS [short message servise] saya dari Pak Gubernur [Anies Baswedan]?” ujar Basuki Kepala awak media yang menunggunya saat keluar dari ruang rapat Komisi V DPR, Rabu (26/2). Apa yang ditunjukkan Basuki menjawab pertanyaan awak media terkait dengan komunikasi soal penanganan banjir antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Persoalan komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat diduga menjadi salah satu penyebab masih terjadinya banjir, tetapi hal ini dibantah Basuki. “Komunikasi jalan terus. Beliau datang ke kantor saya, saya ke beliau, [beliau ini] Gubernur DKI Pak Anies, Pak Anies manggil saya Kangmas, makanya kalau dibilang ada perdebatan sengit, enggak ada itu, kalau saya sampai berdebat itu malu,” katanya.</p>
2	Kompas Halaman 21	Kamis, 27 February 2020	Investor Wajib Ikuti Konsep Kota Hijau	<p>Di tengah langkah pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, mulai muncul perusahaan dari dalam dan luar negeri yang tertarik berinvestasi di ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pemerintah mensyaratkan investasi itu mendukung konsep kota hijau di ibu kota baru. Salah satu upaya mewujudkan kota ramah lingkungan dilakukan pemerintah dengan mendesain sedari awal sistem transportasi berbasis listrik, baik kendaraan pribadi maupun angkutan massal. Perkotaan juga dikonsep menjadi Kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).</p>
3	Kompas Halaman 11	Kamis, 27 February 2020	Beban Berat Pantura Jawa	<p>Banjir yang melanda sebagian wilayah pesisir pantai utara (pantura) Pulau Jawa tidak lepas dari buruknya daya dukung lingkungan. Beban pembangunan infrastruktur, pemukiman, dan industri yang terpusat di pantura sejauh ini belum diimbangi tata kelola hidrologi yang baik. Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah pantura Jawa, di antaranya di Kabupaten Karawang dan Kota Cirebon di Jawa Barat; Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang di Jawa Tengah; serta Kabupaten Sidoarjo dan Tuban di Jawa Timur.</p>

4	Media Indonesia Halaman 2	Kamis, 27 February 2020	Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengingatkan permasalahan banjir di DKI merupakan tanggung jawab semua pihak. Menurutnya, pendekatan penanganan banjir tidak boleh terkendala oleh batas adminidtrasi wilayah lokasi sungai.
5	Tempo Halaman Ekonomi- Bisnis 3-5	Kamis, 27 February 2020	Pemerintah Kembali Kucurkan Subsidi Selisih Bunga Perumahan	Pemerintah kembali memberikan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan subsidi selisih bunga (SSB). Skema tersebut merupakan salah satu insentif dari pemerintah sebesar Rp 1,5 triliun untuk pembiayaan perumahan bersubsidi sebagai salah satu juga guna mengantisipasi gejolak ekonomi akibat penyebaran virus corona atau Covid- 19 asal cina.

Judul	<b>Menteri Hadir, Ke Mana 3 Gubernur?</b>	Tanggal	Kamis, 27 February 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 21		
Resume	<p>“Mau lihat SMS [short message servise] saya dari Pak Gubernur [Anies Baswedan]?” ujar Basuki Kepala awak media yang menunggunya saat keluar dari ruang rapat Komisi V DPR, Rabu (26/2). Apa yang ditunjukkan Basuki menjawab pertanyaan awak media terkait dengan komunikasi soal penanganan banjir antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Persoalan komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat diduga menjadi salah satu penyebab masih terjadinya banjir, tetapi hal ini dibantah Basuki. “Komunikasi jalan terus. Beliau datang ke kantor saya, saya ke beliau, [beliau ini] Gubernur DKI Pak Anies, Pak Anies manggil saya Kangmas, makanya kalau dibilang ada perdebatan sengit, enggak ada itu, kalau saya sampai berdebat itu malu,” katanya.</p>		

## MENTERI HADIR, KE MANA 3 GUBERNUR?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengeluarkan telepon seluler jadul miliknya seraya menunjukkan layanan pesan singkat dari Anies Baswedan, Gubernur DKI.

“Mau lihat SMS [short message servise] saya dari Pak Gubernur [Anies Baswedan]?” ujar Basuki kepada awak media yang menunggunya saat keluar dari ruang rapat Komisi V DPR, Rabu (26/2).

Apa yang ditunjukkan Basuki menjawab pertanyaan awak media terkait dengan komunikasi soal penanganan banjir antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Persoalan komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat diduga menjadi salah satu penyebab masih terjadinya banjir, tetapi hal ini dibantah Basuki.

“Komunikasi jalan terus. Beliau datang ke kantor saya, saya ke beliau, [beliau ini] Gubernur DKI Pak Anies, Pak Anies manggil saya Kangmas, makanya kalau dibilang ada perdebatan sengit, enggak ada itu, kalau saya sampai berdebat itu malu,” katanya.

Basuki boleh jadi melakukan kesalahan penanganan banjir di Jabodetabek sesuai dengan masterplan yang ada.

Akan tetapi, ketidaklaksanaan para gubernur dari tiga provinsi yang terdampak banjir ini dalam raker bersama Komisi V DPR memunculkan kekecewaan dari para wakil rakyat tersebut.

“Setelah itu penanganan banjir jadi lebih baik.”

Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pengrov DKI Nya Ruvina Sari mengatakan bahwa Gubernur Anies berhalangan hadir karena masih meninjau dampak banjir yang terjadi pada Selasa (25/2).

Ruang Diskusi Ketua Komisi V Lasarus mengatakan bahwa sebenarnya raker diagendakan untuk membuka ruang diskusi bersama bagi pemangku kepentingan dalam penanganan banjir di Jabodetabek.

“Saya rasa Menteri PUPR sudah melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya, tapi ada beberapa hal yang menyuguhkan kekecewaan daerah. Jujur saja, Pak Basuki, pasti tidak bisa, ini harus koordinasi dengan pemerintah daerah,” jelasnya.

Lasarus mengatakan bahwa jelas ada masalah saat ini soal penanganan dan pengendalian banjir yaitu persoalan koordinasi. “Sebetulnya masalah ini bukan masalah yang terlalu serius, hanya persoalan koordinasi saja.

Ada kewenangan pemerintah pusat di pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak bisa melakukan pekerjaan serta-merta tanpa bantuan pemerintah daerah.

“DKI ini ditinjau banyak, bisa kerja sendiri, tapi sampai ini bukan kewenangan DKI Sungai Ciliwung ini melintasi dua provinsi, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat berdasarkan aturan,” jelasnya.

Hal yang sama diungkapkan Bupati Rogor Ade Kusn yang mengatakan bahwa secara formal dan rutin pihaknya berkomunikasi dengan pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR terkait banjir. “Harus sinergi antara daerah, ibu kota dengan pusat.”

Dalam paparannya, Basuki mengungkapkan bahwa untuk wilayah kerja Direktorat Sungai dan Pantai Kementerian PUPR, pihaknya memiliki anggaran sekitar Rp6 triliun di seluruh wilayah termasuk Jakarta.

“Apalagi ini saya sampaikan, tidak hanya karena wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane, tapi Jakarta itu ibu kota negara. Jadi, jangan dipelapochi kewenangan, kewenangan untuk keaksanan aja, erogak suka saya, tapi tanggung jawab, termasuk saya bertanggung jawab kalau ada banjir di Jakarta,” katanya.

Adapun, Jakarta masuk dalam wilayah Sungai Ciliwung yang terdiri atas 13 sungai. Hingga saat ini, katanya, sudah ada rencana induk penanganan banjir Jakarta yang telah ditinjau beberapa kali. Masterplan pertama dilakukan oleh Nedeo, kemudian review masterplan pengendalian banjir di

“Sebetulnya masalah ini bukan masalah yang terlalu serius, hanya persoalan koordinasi saja.”

Jakarta dilakukan kembali pada 1997 oleh JICA dan 2007 oleh Jakarta Integrated Flood Management Programme (JIFMP). Basuki mengatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi penyebab banjir mulai dari kapasitas drainase, tanggul yang jebol, sedimentasi dari beberapa kali kejadian banjir yang terjadi di kawasan Jakarta dan sekitarnya.

“Kalau ditanya penanganannya apa yaitu penanganan wilayah sungai, yang kedua koordinasi dengan pemda, misal, dengan Jawa Barat tahun ini hulu Citarum baru ke hulu. Apa yang dilakukan di Bekasi dan Citarum, semua wilayah yang dilewati akan koordinasi mulai Jabar, Rogor. Khususnya Jakarta, ini ibu kota negara, semua bertanggung jawab.”

Raker soal banjir bisa saja ditunda, tetapi penanganannya tidak bisa ditunda. Ketika ditanya apa yang dilakukan Menteri Basuki dengan ditundanya raker ini. Dengan mantap, dia menjawab, “Raperat ditunda karena pemda tidak hadir, saya kerja terus” B

### UPAYA MENGENDALIKAN BANJIR IBU KOTA SEJAK 1973

Strategi pengendalian banjir untuk wilayah Jakarta dikembangkan berdasarkan Masterplan Drainase Jakarta Tahun 1973 (Nedeo) dan Development Company (NEDECO 1973) sebagai bagian dari proyek pengendalian banjir (Komando Proyek Pencegahan Banjir DKI Jakarta/Koprobanjir).

Langkah-langkah utama pengendalian banjir, seperti dikutip dari [sibma.pu.go.id](http://sibma.pu.go.id) termasuk pengembangan Cengkering Drain dan Cakung Drain, polder Pluit, Melati, Setiabudi Barat dan Timur, Tomang, Grogol dan Sunter, rehabilitasi Sungai Ciliwung dan Krakatau dan desain Banjir Kanal Timur disertai polder dan sistem drainase NHE/NEDECO 1973 dilanjutkan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) 1991, 1997; Sistem Jawa Environmental Management Project (JEMEP) 2002; Jakarta Flood Management (JFM) 2007-2009; Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) 2012; JIKO 2014, dan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) 2014.

Adapun, strategi penanganan banjir hulu-hilir menjadi rencana berikutnya.

NEDECO 1973 sudah mengidentifikasi perlunya polder besar untuk melindungi dan mengalirkan air banjir di dataran rendah, di daerah utara yang terjadi penurunan secara perlahan.

Strategi pengendalian banjir mempunyai 3 prinsip.

Pertama, mengalihkan aliran sungai dari hulu melalui saluran banjir (menghindari air banjir mengalir melalui daerah padat penduduk).

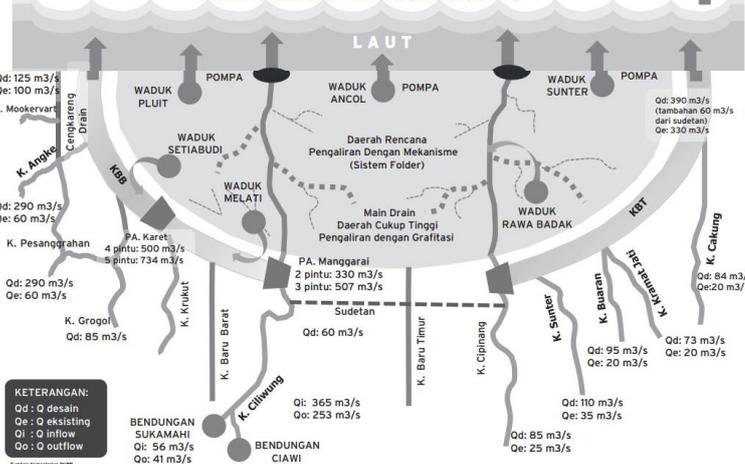
Kedua, melindungi daerah dataran rendah dengan skema polder.

Ketiga, mengalirkan sisa air yang tidak melalui polder ke laut melalui saluran gravitasi.

Dorongan akhir untuk dimulainya pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) dilakukan melalui Jakarta Flood Management Project (JFM 2007-2009). Pada saat yang sama diakui pula bahwa dengan selesainya BKT, strategi pengelolaan banjir dapat dilanjutkan dengan meng-hubungkan/sudetan Ciliwung dan BKT. Sudetan ini untuk mengalihkan air banjir dari saluran utama dan melalui padat penduduk ke Banjir Kanal Barat (BKB) menuju BKT yang merupakan saluran baru dan besar yang dikombinasikan dengan rehabilitasi dan peningkatan Cakung Drain. Pembangunan sudetan Ciliwung ke BKT dimulai sejak 2013, tetapi sampai sekarang belum selesai.

### MASTERPLAN PENGENDALIAN BANJIR JAKARTA

MASTERPLAN I = 1973 (NEDECO)  
REVIEW MASTERPLAN = 1997 (JICA) & 2007 (JIFMP\*)



\*JIFMP Jakarta Integrated Flood Management Program

Judul	Investor Wajib Ikuti Konsep Kota Hijau	Tanggal	Kamis, 27 February 2020
Media	Kompas Halaman 21		
Resume	Di tengah langkah pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, mulai muncul perusahaan dari dalam dan luar negeri yang tertarik berinvestasi di ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pemerintah mensyaratkan investasi itu mendukung konsep kota hijau di ibu kota baru. Salah satu upaya mewujudkan kota ramah lingkungan dilakukan pemerintah dengan mendesain sedari awal sistem transportasi berbasis listrik, baik kendaraan pribadi maupun angkutan massal. Perkotaan juga dikonsept menjadi Kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).		

## IBU KOTA BARU

# Investor Wajib Ikuti Konsep Kota Hijau

**JAKARTA, KOMPAS**— Di tengah langkah pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, mulai muncul perusahaan dari dalam dan luar negeri yang tertarik berinvestasi di ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pemerintah mensyaratkan investasi itu mendukung konsep kota hijau di ibu kota baru.

[klik.kompas.id/konektivitasaltim](http://klik.kompas.id/konektivitasaltim)

Salah satu upaya mewujudkan kota ramah lingkungan dilakukan pemerintah dengan mendesain sedari awal sistem transportasi berbasis listrik, baik kendaraan pribadi maupun angkutan massal. Perkotaan juga dikonsept menjadi kawasan

(Bersambung ke him 11 kol 1-2)

## Investor Wajib Ikuti Konsep

(Sambungan dari halaman 1)

berorientasi transit atau *transit oriented development* (TOD).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta, Rabu (26/2/2020), menuturkan, setidaknya 30 perusahaan besar ingin berinvestasi di ibu kota baru. Perusahaan itu dari dalam dan luar negeri yang bergerak di bidang listrik hingga kendaraan. Calon investor luar negeri di antaranya dari Amerika Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab, Singapura, Australia, dan China.

Luhut memastikan, perusahaan yang akan berinvestasi itu berkontribusi terhadap konsep kota hijau. "Semua (perusahaan) kami minta dengan *high quality*. Kami enggak mau nanti jadi enggak (berkonsep) *green city*," kata Luhut dalam diskusi "Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara" yang diselenggarakan harian *Kompas* dan Kementerian Perhubungan.

Diskusi juga dihadiri antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins, serta Pemimpin Redaksi *Kompas* Ninuk Mardiana Pambudy.

Luhut menambahkan, pemerintah akan memperketat aturan kepatuhan berkendara di ibu kota baru. Kendaraan yang diperbolehkan masuk kawasan ibu kota harus ramah lingkungan atau berbasis listrik (*electric vehicle/EV*). "Kalau enggak EV, enggak boleh masuk di kota itu. Kalau masuk ke dalam, harus EV atau *public transportation* yang pakai EV," ucap Luhut.

### Konektivitas

Budi mengatakan, selain ken-

daraan harus berbasis listrik agar ramah lingkungan, perkotaan juga dikonsept menjadi kawasan berorientasi transit. Dengan demikian, masyarakat cukup berjalan kaki menuju moda transportasi umum.

"Konektivitas bagi satu kota sangat penting karena dengan konektivitas, aksesibilitas atau kestrategisan kota itu menjadi baik. Itu menjadi salah satu unsur keberhasilan ibu kota baru," ujar Budi.

Untuk mendukung konektivitas di ibu kota baru, pemerintah juga akan mengoordinasikan dua bandara yang sudah ada di Kalimantan Timur dan akan membangun satu bandara khusus untuk tamu-tamu negara atau *very very important person* (VVIP). Bandara itu akan dibangun pada akhir 2021, dengan posisi sekitar 15 kilometer dari pusat ibu kota negara.

Sementara itu, Sekretaris Tim Kajian Ibu Kota Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Hayu Parasati mengatakan, RUU Ibu Kota Negara masih dibahas. "Perkiraan, bulan Juni, semua rancangan UU dan *master plan* siap sehingga Juli sudah dimulai *soft ground breaking* yang dimulai seterusnya dengan penyiapan pembangunan fisik," katanya.

Hayu menambahkan, konektivitas harus didahulukan dalam pembangunan ibu kota baru. Ini karena ibu kota negara harus menjadi pendorong ekonomi di kawasan Indonesia timur sekaligus berkolaborasi dengan kota-kota besar di sekelilingnya, yaitu Samarinda dan Balikpapan.

Judul	<b>Beban Berat Pantura Jawa</b>	Tanggal	Kamis, 27 February 2020
Media	Kompas Halaman 11		
Resume	Banjir yang melanda sebagian wilayah pesisir pantai utara (pantura) Pulau Jawa tidak lepas dari buruknya daya dukung lingkungan. Beban pembangunan infrastruktur, pemukiman, dan industri yang terpusat di pantura sejauh ini belum diimbangi tata kelola hidrologi yang baik. Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah pantura Jawa, di antaranya di Kabupaten Karawang dan Kota Cirebon di Jawa Barat; Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang di Jawa Tengah; serta Kabupaten Sidoarjo dan Tuban di Jawa Timur.		

# Beban Berat Pantura Jawa

Hujan deras dan buruknya tata hidrologi di sebagian wilayah pantai utara Pulau Jawa memicu banjir tahunan yang tak kunjung teratasi. Puluhan ribu warga terdampak.

**JAKARTA, KOMPAS** — Banjir yang melanda sebagian wilayah pesisir pantai utara (pantura) Pulau Jawa tidak lepas dari buruknya daya dukung lingkungan. Beban pembangunan infrastruktur, permukiman, dan industri yang terpusat di pantura sejauh ini belum diimbangi tata kelola hidrologi yang baik.

Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah pantura Jawa, di antaranya di Kabupaten Karawang dan Kota Cirebon di Jawa Barat; Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang di Jawa Tengah; serta Kabupaten Sidoarjo dan Tuban di Jawa Timur.

Di Karawang hingga Rabu (26/2/2020), banjir melanda sejumlah desa di 26 kecamatan. Di Kecamatan Telukjambe Barat, misalnya, banjir hingga ketinggian 2 meter dipicu hujan deras dan luapan Sungai Cibeet. Sebanyak 1.367 keluarga dan 1.204 rumah terdampak banjir.

Di kecamatan lain, banjir dipicu meluapnya sejumlah sungai, seperti Sungai Cilamaya, Sungai Cidawolong, Sungai Citarum, dan Sungai Cikarang-gelam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang mencatat 9.770 orang mengungsi dan 14.808 rumah yang dihuni 15.734 keluarga terdampak banjir.

"Saya belum sempat memindahkan barang-barang, tetapi air banjir keburu masuk rumah. Semua alat elektronik terendam," kata Wasem (37), warga Desa Karangligar, Telukjambe Barat, yang rumahnya kebanjiran sejak Selasa (25/2) siang.

Di Kota Pekalongan, banjir

setinggi hingga 40 sentimeter masih menggenangi sejumlah wilayah. Banjir terjadi sejak pertengahan pekan lalu dan surut pada akhir pekan. Namun, air kembali menggenangi sejak hujan lebat pada Senin (24/2) dan Sungai Bremsi serta Meduri meluap.

Hingga kemarin, 1.222 jiwa mengungsi di 10 lokasi. Lokasi utama pengungsian berada di Stadion Hoegeng. "Biasanya surut dalam 1-2 hari, tetapi ini sudah hari ketiga, rumah masih terendam sekitar 20 cm. Surutnya lebih lama dari biasanya," ujar Abdul Hadi (40), warga Kelurahan Panjang Wetan, Pekalongan Utara.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara, kemarin, memberikan bantuan di sejumlah pengungsian di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Pemalang. Bantuan senilai Rp 1,2 miliar diberikan dalam bentuk beras, logistik bencana alam, dan alat kebersihan.

"Koordinasi terus dilakukan agar sama-sama menanggulangnya. Juga kami berikan layanan dukungan psikososial agar mereka tak trauma dan cemas. Ini kami perhatikan terus," kata Juliari.

Banjir juga masih menggenangi sejumlah wilayah di Sidoarjo, antara lain di Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Taman. Bahkan, di dua desa di Tanggulangin, yakni Desa Kedungbanteng dan Banjarasri, banjir terjadi sejak awal tahun atau hampir dua bulan.

BPBD Sidoarjo mencatat jumlah warga terdampak banjir mencapai 2.500 jiwa atau se-

kitar 600 keluarga. Selama masa tanggap darurat, korban banjir mendapat bantuan makanan nasi bungkus setiap hari.

Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin mengatakan, upaya penanggulangan banjir di Kedungbanteng dan Banjarasri tetap mengandalkan mesin pompa.

## Tata ruang

Pakar hidrologi dari Universitas Diponegoro, Semarang, Robert Kodoatie, mengatakan, banjir di pesisir utara, seperti Pekalongan, Kendal, Demak, dan Pemalang, dipicu penataan tata ruang yang buruk. Unsur tata kelola air yang baik tidak masuk dalam aturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di daerah tersebut.

"Jika aliran air dari hulu ke laut jadi pertimbangan, dampak banjir bisa ditekan. Namun, saat merancang RTRW, pemerintah tidak melihat keberadaan air yang secara alami mengalir dari gunung ke laut berdasarkan siklus hidrologi. Yang kena getahnya adalah wilayah di dataran rendah," ujarnya.

Pengamat tata kota dan lingkungan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menuturkan, persoalan banjir di pantura Jawa sebagian besar terjadi karena sistem daerah aliran sungai yang tidak mendukung ketika curah hujan meningkat.

"Resapan menghilang akibat pembangunan, kapasitas sistemnya juga berubah. Hal ini diperparah perubahan tata ruang," katanya.

(GRE/DIT/IKI/MEL/RTG/BRO/NIK)

Judul	<b>Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama</b>	Tanggal	Kamis, 27 February 2020
Media	Media Indonesia Halaman 2		
Resume	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengingatkan permasalahan banjir di DKI merupakan tanggung jawab semua pihak. Menurutnya, pendekatan penanganan banjir tidak boleh terkendala oleh batas administrasi wilayah lokasi sungai.		



ANTARA/HELLO ARSIP

**BAHAS PENANGANAN BANJIR:** Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono (tengah) dengan disaksikan Wakil Menteri John Wempi (kanan) berbincang dengan Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam rapat kerja/rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Raker/RDP itu membahas penanganan banjir di Jabodetabek.

## Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengingatkan permasalahan banjir di DKI merupakan tanggung jawab semua pihak. Menurutnya, pendekatan penanganan banjir tidak boleh terkendala oleh batas administrasi wilayah lokasi sungai.

"Di Jabodetabek ada wilayah Sungai Ciliwung, Cisadane, Citarum. Makanya bukan ditetapkan pada batasan administrasi. Administrasi hanya karena sistematisa pemerintahan. Penanganannya bukan administrasi, tapi batasan sungai," tutur Basuki sesuai rapat penanganan banjir Ibu Kota yang diinisiasi Komisi V DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Komisi V juga mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin

Halim, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tetapi ketiganya tidak hadir. Anies diwakili Deputi Tata Ruang Pera Revinasari, Ridwan Kamil diwakili Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dan Wahidin diwakili Sekda Banten Al Muktabar.

Basuki menjelaskan Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai penyebab banjir di Jakarta. Wilayah Sungai Ciliwung terdiri atas 13 sungai lain. Untuk itu, penanganan banjir di Jakarta, dalam hal ini normalisasi sungai, harus dilakukan berdasarkan masterplan mulai penanganan bendungan di hulu, normalisasi sungai, perbesaran kapasitas situ, hingga penempatan pompa air.

"Apalagi ini sekarang yang saya sampaikan, tidak hanya karena wilayah Ciliwung-Cisadane, tapi

Jakarta itu ibu kota negara. Jangan dipecah-pecah kewenangan. Kewenangan itu kekuasaan aja, nggak suka saya. Tapi tanggung jawab, termasuk saya ini bertanggung jawab kalau ada banjir di Jakarta," ungkapnya.

### Pansus banjir

Anggota Komisi V DPR Rifqinizamy Karyasuda dari Fraksi PDIP menilai para gubernur di tiga provinsi terdampak banjir tidak memiliki niat serius mengatasi banjir.

"Saya kira kita perlu bentuk pansus agar gubernur, bupati, wali kota yang tidak hadir sebagaimana dalam UU MD III bisa kita paksa datang ke sini karena dengan itu, DPR memungkinkan memaksa untuk mengundang warga negara atau siapa pun yang perlu diun-

dang," ujar Rifqinizamy dalam rapat penanggulangan banjir Ibu Kota, kemarin.

Kekecewaan yang sama juga disampaikan anggota Komisi V dari Fraksi NasDem Robert Rouw.

Dia menyebut ke-3 gubernur itu tampak tidak serius dalam mengatasi permasalahan banjir di Jakarta dan sekitarnya.

"Kita bersemangat bicara, tetapi daerah-daerah tidak punya hati. Untuk apa kita bicara banyak-banyak di sini kalau kepala daerahnya tidak ada?" kata Robert.

Ketua Komisi V DPR Lasarus menuturkan akan mengkaji usul wacana pembentukan pansus banjir itu. Komisi V DPR akan berkoordinasi dengan komisi-komisi lain terkait dengan wacana itu untuk menuntaskan permasalahan banjir. (Uta/RF/BY/X-10)

Judul	<b>Pemerintah Kembali Kucurkan Subsidi Selisih Bunga Perumahan</b>	Tanggal	Kamis , 27 February 2020
Media	Tempo Halaman Ekonomi-Bisnis 3-5		
Resume	Pemerintah kembali memberikan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan subsidi selisih bunga (SSB). Skema tersebut merupakan salah satu insentif dari pemerintah sebesar Rp 1,5 triliun untuk pembiayaan perumahan bersubsidi sebagai salah satu juga guna mengantisipasi gejolak ekonomi akibat penyebaran virus corona atau Covid- 19 asal cina.		

# Pemerintah Kembali Kucurkan Subsidi Selisih Bunga Perumahan

Sempat dihapus karena dianggap membebani fiskal.

EDISI, 27 FEBRUARI 2020



Pembangunan perumahan di kawasan Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat, Desember lalu. Tempo/Tony Hartawan

**JAKARTA** – Pemerintah kembali memberikan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan subsidi selisih bunga (SSB). Skema tersebut merupakan salah satu insentif dari pemerintah sebesar Rp 1,5 triliun untuk pembiayaan perumahan bersubsidi sebagai salah satu jurus guna mengantisipasi gejolak ekonomi akibat penyebaran virus corona atau Covid-19 asal Cina.

"(Anggaran) ini akan dilakukan mulai April," tutur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono di Gedung Parlemen, Senayan, kemarin.

Berdasarkan hasil rapat terbatas yang digelar bersama Presiden Joko Widodo pada Selasa lalu, Basoeki mengatakan, dari total insentif Rp 1,5 triliun itu, pemerintah menggelontorkan skema SSB sebesar Rp 800 miliar dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp 700 miliar. Dengan begitu, ada tambahan bantuan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

## BERITA TERKAIT

**Influencer Fokus Pulihkan 10 Destinasi yang Terkena Dampak Corona**

**Pemerintah Seleksi Pemengaruh Asing Promosikan Pariwisata**

## BERITA LAINNYA

by Debitel

**KPK Stop Penyelidikan Kasus Politikus hingga Pejabat Kementerian - Laporan Utama**

**Pemerintah Dorong Pemanfaatan Skema Baru Subsidi Perumahan - Ekonomi dan...**

**Bantuan Uni Eropa untuk Menangkal Covid-19 - Peristiwa**

**Penghentian Penyelidikan 36 Kasus di KPK Janggal - Laporan Utama**

sebanyak 175 ribu unit.

## Berita Lainnya

by  Doble

- Pesona Komposisi Tchaikovsky - Seni
- DPR Panggil Anies Soal Polemik Taman Ismail Marzuki - Metro
- Kunjungan Perdana Presiden Donald Trump ke India - Peristiwa
- Tersangkut Skandal Seks Mesum, Menteri Keuangan Skotlandia...
- Beban Utang Picu BUMN Karya Jual Aset - Laporan Utama
- Investor Cermati Penyelesaian Utang BUMN Karya - Ekonomi dan...

Tahun ini, pemerintah sebetulnya telah menghapus skema pembiayaan SSB dari anggaran negara karena dianggap membebani fiskal. Pasalnya, ketika pembiayaan SSB dikucurkan, pemerintah harus mengawal kreditur hingga tenornya berakhir, yaitu sekitar 15-20 tahun ke depan, untuk menyiapkan selisih bunganya. Adapun realisasi tahun lalu sudah mencapai 99.907 unit.

Secara kinerja, SSB menjadi skema pembiayaan kepemilikan rumah dengan realisasi serapan terbesar sepanjang 2015-2018, yakni mampu menyasar 558.848 unit. Meski demikian, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,8 miliar untuk pembayaran akad tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, untuk menghalau dampak corona, akhirnya pemerintah membuka skema SSB kembali.

"Pasarnya di situ (skema SSB). Banyak yang mau beli dengan kami bantu lewat SSB atau SBUM. REI (Real Estate Indonesia) dan BTN, mereka yang tahu pasarnya," tutur Basoeki.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Eko D. Heripoerwanto mengatakan pemerintah masih harus membahas mekanisme insentif pembiayaan perumahan bersubsidi bersama Kementerian Keuangan pada Jumat nanti. "Betul (SSB diberikan lagi). Ini keputusan baru pemerintah. Skema SSB baru akan berbeda dengan SSB sebelumnya," ujar Heri.

Dengan adanya penambahan insentif tersebut, total alokasi bantuan pembiayaan perumahan sebanyak 330 ribu unit, yakni anggaran existing untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 88 ribu unit, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan tambahan sebanyak 175 ribu unit.

Pelaksana tugas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufansa Wira Sakti, mengatakan, selain mengurangi dampak virus corona, insentif bertujuan untuk mengurangi backlog atau kesenjangan perumahan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor perumahan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dan mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Aperisi) Daniel Djumali menilai insentif sektor perumahan sudah tepat. Apalagi, kata dia, sektor perumahan mempunyai efek ganda atau multiplier effect terhadap lebih dari 150 sektor industri lainnya, seperti semen, batako, besi, pasir, batu, keramik, cat, pintu, aluminium, baja ringan, kaca, dan genting. **LARISSA HUDA**